

Peran Tokoh Masyarakat Formal Dan Informal Pada Pengembangan Objek Wisata Tubing Bon Pondoh

D. Devina¹, H. Wahyono²

¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kabupaten Purbalingga

² Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 16 September 2022

Accepted: 20 September 2022

Available Online: 10 September 2024

Keywords:

The role of formal and informal community figures, Tubing Bon Pondoh tourist attraction

Corresponding Author:

Dea Devina

Diponegoro University,
Semarang, Indonesia

Email: ddevina936@gmail.com

Abstract: *The development of tourism in Indonesia is currently focused on developing rural tourism due to the changing trend of conventional tourism destinations becoming traditional. Tubing Bon Pondoh is one of the tourist attractions based on local potential in the form of tubing curving activities that utilize irrigation canals and is located in Temanggung Regency. From its early development until now, formal and informal community figures have not directly participated in the development of the Tubing Bon Pondoh, especially formal community figures, the village head. The importance of the role of community figures, both formal and informal, is the aim of this article, which is to examine the role of formal and informal community figures in the development of the Tubing Bon Pondoh tourist attraction. Using qualitative methods with resource selection techniques using snowball sampling and thematic and qualitative descriptive analysis techniques, the information that can be presented in this article is regarding informal community figures who continue to carry out development activities for the Tubing Bon Pondoh tourist attraction even though there is no participation and support from the village head as formal community figures because it has the support of the district government, the tourism office, and the head of the Temanggung Regency Pokdarwis.*

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a

Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

How to cite (APA 6th Style):

Devina, D., & Wahyono, H. (13 C.E.). Peran Tokoh Masyarakat Formal Dan Informal Pada Pengembangan Objek Wisata Tubing Bon Pondoh. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 13(3), 206–214.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai macam fasilitas dan layanan yang disediakan baik oleh masyarakat, pengusaha maupun pemerintah pusat/daerah (Suparjan & Suyatno, 2003). Selain itu, pariwisata juga merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan di pedesaan, karena pariwisata adalah strategi pembangunan ekonomi lokal (daerah) melalui pengembangan potensi industri pariwisata (Jackson & Murphy, 2006). Didukung dengan adanya perubahan kecenderungan tujuan wisata, dari wisata konvensional menjadi wisata tradisional yang berada di pedesaan, menyebabkan arah kebijakan pembangunan pariwisata juga berubah menjadi pengembangan pariwisata pedesaan sebagai pariwisata alternatif. Maka dari itu, diterbitkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM/001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Kedua kebijakan peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata pedesaan merupakan sebuah upaya dalam mengembangkan wisata berbasis potensi lokal

sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan yang tidak terlepas dari adanya upaya pemberdayaan masyarakat.

Objek Wisata Tubing Bon Pondoh merupakan salah satu objek wisata berbasis potensi lokal di Kabupaten Temanggung. Dikatakan objek wisata berbasis potensi lokal, karena memanfaatkan potensi alam dan memanfaatkan saluran irigasi yang melewati Dusun Pondoh, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat. Selain itu, objek wisata lokal ini dikembangkan untuk mewujudkan tujuan adanya Kampung KB Dusun Pondoh yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan potensi alam dan budaya yang dimiliki. Maka dari itu, masyarakat lokal Dusun Pondoh dan kelompok Kampung KB sepakat untuk mengembangkan kegiatan wisata susur tubing yang kemudian diberi nama Objek Wisata Tubing Bon Pondoh. Pengembangan kegiatan susur tubing juga bertujuan untuk menginisiasi pengembangan potensi lokal lainnya baik di Dusun Pondoh maupun di Desa Rejosari sehingga dapat dikembangkan menjadi desa wisata.

Selama proses pengembangannya, sejak mulai dikembangkan pada September 2019 dan harus berhenti karena adanya pandemi *covid-19*, lalu dimulai kembali pada Oktober 2021 setelah kebijakan PPKM dilonggarkan oleh pemerintah, objek wisata Tubing Bon Pondoh mengalami kendala utama berupa dukungan dan peran dari tokoh masyarakat baik yang bersifat formal maupun informal, terutama dari pemerintah desa sebagai tokoh masyarakat formal. Tokoh masyarakat formal yang justru memiliki kekuasaan struktural yang dapat memberikan pengaruh dan peran yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat lokal dan memberikan arahan terhadap pengembangan objek wisata berbasis potensi lokal, belum dapat mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa merasa selama legalitas hak kepemilikan saluran irigasi yang digunakan untuk susur tubing belum berada dibawah wewenang pemerintah desa, maka pemerintah desa tidak dapat mendukung dan berperan dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 Tahun 2015 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi, kewenangan saluran irigasi yang digunakan untuk kegiatan wisata susur tubing tersebut mengaliri daerah irigasi Soropadan. Daerah irigasi Soropadan ini merupakan daerah irigasi yang melintasi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sehingga kewenangan dan tanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan saluran irigasi dan daerah irigasi menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tokoh masyarakat merupakan tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat luas yang dapat menjadi pemersatu bangsa (Surbakti, 1992), yang terdiri dari beberapa unsur seperti pemimpin agama, pengusaha, cendekiawan/intelektual, pemikir, seseorang yang dituakan, penyandang dana, dan lain-lain (Sutarno, 2008). Terdapat dua jenis tokoh masyarakat berdasarkan sifatnya, yaitu tokoh masyarakat formal dan informal. Tokoh masyarakat formal merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kedudukan struktural dalam sebuah lembaga dengan segala hak dan kewajibannya mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Beberapa unsur yang termasuk dalam tokoh masyarakat formal adalah camat, kepala desa/lurah yang biasa juga disebut dengan perwujudan pranata sosial. Sedangkan tokoh masyarakat informal merupakan tokoh masyarakat yang disegani, dihormati, dituakan, diakui karena memiliki peran penting dan berpengaruh dalam memimpin dan mengayomi masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan lain-lain (Kusnadi & Iskandar, 2017).

Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam dalam pengembangan potensi lokal (Hanajayani & Sariffuddin, 2018). Tokoh masyarakat formal dan informal jelas memiliki sifat dan jiwa kepemimpinan serta keteladanan yang menjadi acuan masyarakat dalam bertindak, sehingga apapun yang dilakukan tokoh masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal akan memicu partisipasi masyarakat (Suhendi, 2013). Dikuatkan oleh pendapat Pinel (1986) dalam Hanajayani & Sariffuddin (2018), dengan adanya peran dan partisipasi masyarakat lokal dan pemerintah desa dalam pengembangan wisata berbasis potensi lokal, maka pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan berimbang antar aspeknya, seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan,

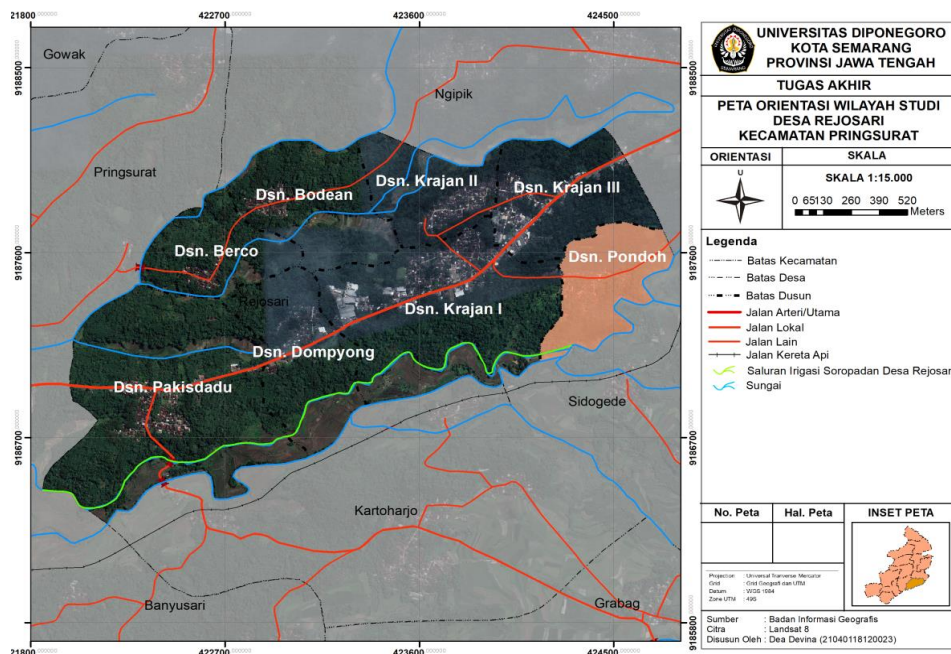
sehingga pengembangan wisata berbasis potensi lokal dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena, dalam pengembangan wisata berbasis potensi lokal, baik tokoh masyarakat formal maupun informal memiliki kebijaksanaan yang sama terkait dengan apa yang harus dilakukan, apa yang diinginkan, dan apa yang dibutuhkan oleh keduanya.

Pemerintah desa dan masyarakat lokal selain sebagai tokoh masyarakat formal dan informal, juga merupakan komponen utama pemberdayaan masyarakat (Suparjan & Suyatno, 2003). Dengan perannya yang penting dalam pengembangan wisata berbasis potensi lokal, dan perannya dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis potensi lokal, maka dibutuhkan kerja sama yang baik danimbang antar tokoh masyarakat formal dan informal, sehingga pengembangan wisata berbasis potensi lokal dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat secara menyeluruh (Okazaki, 2008). Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yang sekaligus sebagai hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah untuk mengkaji bagaimana peran tokoh masyarakat formal dan informal pada pengembangan objek wisata berbasis potensi lokal, yaitu objek wisata Tubing Bon Pondoh yang terletak di Dusun Pondoh, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.

2. DATA DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan objek wisata Tubing Bon Pondoh yang berada di Dusun Pondoh, Desa Rejosari. Selain itu, masyarakat Dusun Pondoh akan menjadi sasaran penelitian kajian terkait peran tokoh masyarakat formal dan informal pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh.

Gambar 1. Peta Orientasi Wilayah Studi (Analisis, 2022)



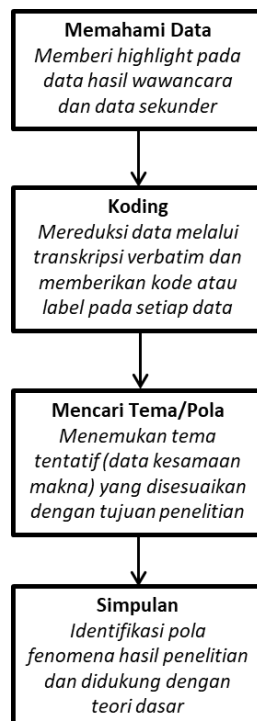
Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* yang termasuk ke dalam jenis *purposive sampling*. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menentukan kriteria narasumber yang dianggap mampu menjawab target informasi pada penelitian sesuai dengan arahan dan masukan dari *key person* yang dipilih oleh peneliti. Dalam penelitian ini *key person* yang dimaksud adalah Ketua Pokdarwis Tubing Bon Pondoh sekaligus ketua tim pengelola objek wisata Tubing Bon Pondoh. Adapun target informasi yang ingin diperoleh adalah:

- Bagaimana sejarah awal dikembangkannya objek wisata Tubing Bon Pondoh dan siapa yang mengisi ?
- Bagaimana dukungan dan peran pemerintah desa pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh ?
- Bagaimana dukungan dan peran masyarakat lokal Dusun Pondoh, tim pengelola objek wisata Tubing Bon Pondoh dan kelompok masyarakat yang ada di Dusun Pondoh pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh ?

Tabel 1. Narasumber dan Target Informasi (Analisis, 2022)

No.	Narasumber	Target Informasi
1.	Kepala Desa Rejosari	Peran dan dukungan pemerintah desa pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh
2.	Tim Pengelola Objek Wisata Tubing Bon Pondoh	Sejarah objek wisata Tubing Bon Pondoh serta peran tim pengelola dan masyarakat lokal Dusun Pondoh pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh
3.	Anggota Ibu-Ibu PKK sekaligus Kampung KB	Peran dan dukungan kelompok Ibu-Ibu PKK dan Kampung KB serta masyarakat lokal Dusun Pondoh pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh
4.	Ketua Kelompok Karang Taruna	Peran dan dukungan kelompok Karang Taruna dan masyarakat lokal Dusun Pondoh pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh

Gambar 2. Bagan Proses Analisis Tematik (Modifikasi Peneliti dan Heriyanto (2018), 2022)



Kemudian dengan menggunakan teknik analisis tematik dalam mengkaji peran tokoh masyarakat formal dan informal pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh, maka data-data yang diperoleh dari narasumber sesuai dengan target informasi yang ingin diperoleh akan

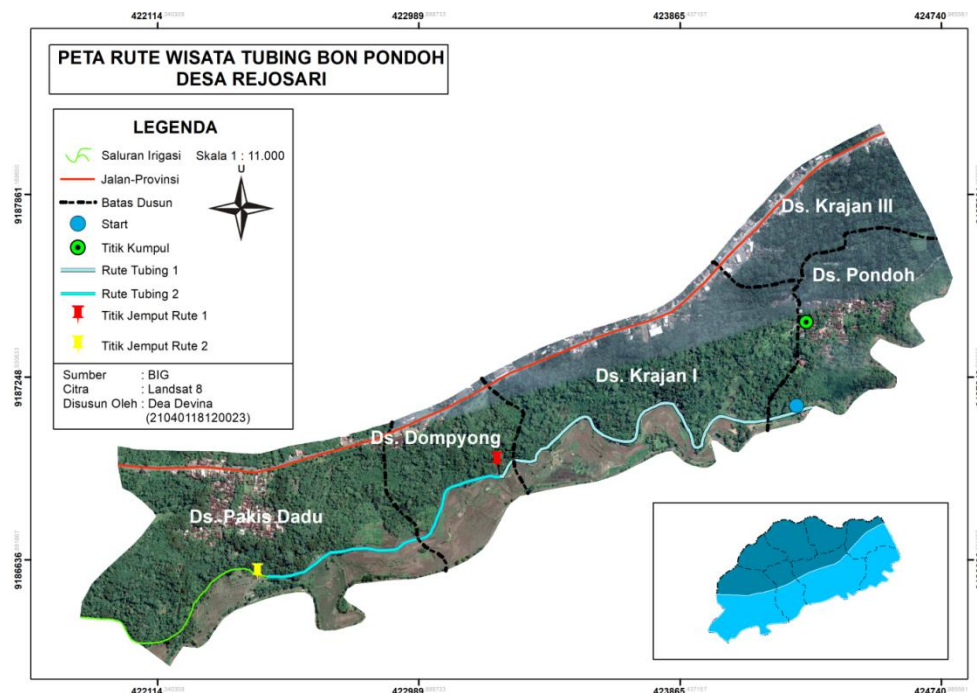
dirangkum dalam transkrip wawancara. Setelah data dirangkum dalam transkrip wawancara, maka akan di berikan kode untuk memudahkan peneliti dalam melakukan identifikasi data yang memiliki tema atau pola yang sama dari pengulangan jawaban yang disampaikan narasumber penelitian. Sehingga, data yang sudah diberikan kode dan disatukan sesuai dengan tema atau polanya, akan dideskripsikan dengan didukung teori dasar atau kajian literatur yang digunakan peneliti (Guest, MacQueen, & Namey, 2012). Berikut bagan analisis tematik yang digunakan untuk mengkaji peran tokoh masyarakat formal dan informal pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Objek Wisata Tubing Bon Pondoh

Objek Wisata Tubing Bon Pondoh dikembangkan pada Bulan September 2019 oleh masyarakat lokal Dusun Pondoh dan kelompok Kampung KB Dusun Pondoh dan merupakan kegiatan wisata susur tubing. Objek wisata ini dikembangkan untuk mewujudkan tujuan dari adanya Kampung KB Dusun Pondoh yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan potensi alam dan budaya yang dimiliki. Pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh selain untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya Kampung KB, juga sebagai inisiasi awal pengembangan potensi lokal lainnya baik di Dusun Pondoh maupun desa Rejosari. Hal ini juga didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung dan Ketua Pokdarwis Kabupaten Temanggung yang sekaligus sebagai Ketua Pokdarwis Kedu. Tim pengelola objek wisata Tubing Bon Pondoh yang juga disebut dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tubing Bon Pondoh, beranggotakan masyarakat lokal Dusun Pondoh dengan awal anggota merupakan sebagian anggota kelompok Kampung KB dan masyarakat lokal Dusun Pondoh yang secara sukarela bergabung dengan tim pengelola objek wisata ini. Hal ini disebabkan karena yang menginisiasi pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh adalah masyarakat lokal Dusun Pondoh bersama dengan kelompok Kampung KB.

Gambar 3. Peta Rute Susur Tubing Wisata Tubing Bon Pondoh (Analisis, 2022)



Kegiatan wisata yang ditawarkan oleh objek wisata Tubing Bon Pondoh merupakan kegiatan susur tubing pada saluran irigasi. Saluran irigasi ini melewati 4 dusun yang ada di Desa Rejosari, yaitu Dusun Pondoh, Dusun Krajan I, Dusun Dompuyong dan Dusun Pakisdadu dan mengalir daerah irigasi seluas 504 ha yang disebut dengan Daerah Irigasi Soropadan, dan melintasi dua kabupaten yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Terdapat dua rute susur tubing yang ditawarkan kepada wisatawan, yaitu rute susur tubing 1 dengan rute dari titik start di Dusun Pondoh dan titik jemput di Dusun Dompuyong (titik jemput 1), dan rute susur tubing 2 dengan rute dari titik start yang sama di Dusun Pondoh dan titik jemput di Dusun Pakisdadu (titik jemput 2) yang merupakan akhir dari kegiatan susur tubing.

Peran Tokoh Masyarakat Formal dan Informal pada Pengembangan Objek Wisata Tubing Bon Pondoh

Peran tokoh masyarakat formal pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh merupakan Pemerintah Desa Rejosari. Pemerintah desa merupakan tokoh masyarakat yang diangkat dan dipilih berdasarkan kedudukan struktural dalam sebuah lembaga dengan segala hak dan kewajiban, maka dari itu pemerintah desa berhak dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap bagaimana pengembangan kegiatan tubing akan dikembangkan. Selain itu, dengan kekuasaan struktural yang dimiliki, maka pemerintah desa dapat memberikan pengaruh dan peran yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata berbasis potensi lokal. Hal ini karena sebagai tokoh masyarakat yang memiliki sifat dan jiwa kepemimpinan dan keteladanan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak, sehingga apapun yang dilakukan pemerintah desa sebagai tokoh masyarakat formal khususnya, maka akan memicu partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis potensi lokal. Namun, pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh, pemerintah desa belum dapat memberikan dukungannya dan berperan dalam pengembangan objek wisata ini. Alasan pemerintah desa belum dapat memberikan dukungan dan berperan dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh, karena terkendala legalitas hak kepemilikan saluran irigasi. Pemerintah desa beranggapan bahwa jika saluran irigasi belum menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa sepenuhnya, maka pemerintah akan sulit memberikan dukungannya dan berperan dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh. Sedangkan, berdasarkan Lampiran 2 Permen PUPR No. 14/PRT/M Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, saluran irigasi yang digunakan untuk kegiatan susur tubing merupakan saluran irigasi yang mengalir daerah irigasi Soropadan dengan luas 504 ha dan melintasi dua kabupaten yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sehingga pengelolaan saluran irigasi tersebut menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada kantor operasional yang biasa disebut dengan Balai PSDA Probolo.

Meskipun begitu, Balai PSDA Probolo tetap menawarkan kerja sama dengan pemerintah desa berupa sistem sewa dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh dengan tetap memanfaatkan dan menggunakan saluran irigasi tersebut namun tidak membangun sarana dan prasarana fisik permanen di sekitar saluran irigasi. Akan tetapi pemerintah desa tetap menolak karena beranggapan kerja sama tersebut dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat lokal Dusun Pondoh. Maka dari itu, hingga saat ini pemerintah desa masih belum memberikan dukungan dan berperan dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh.

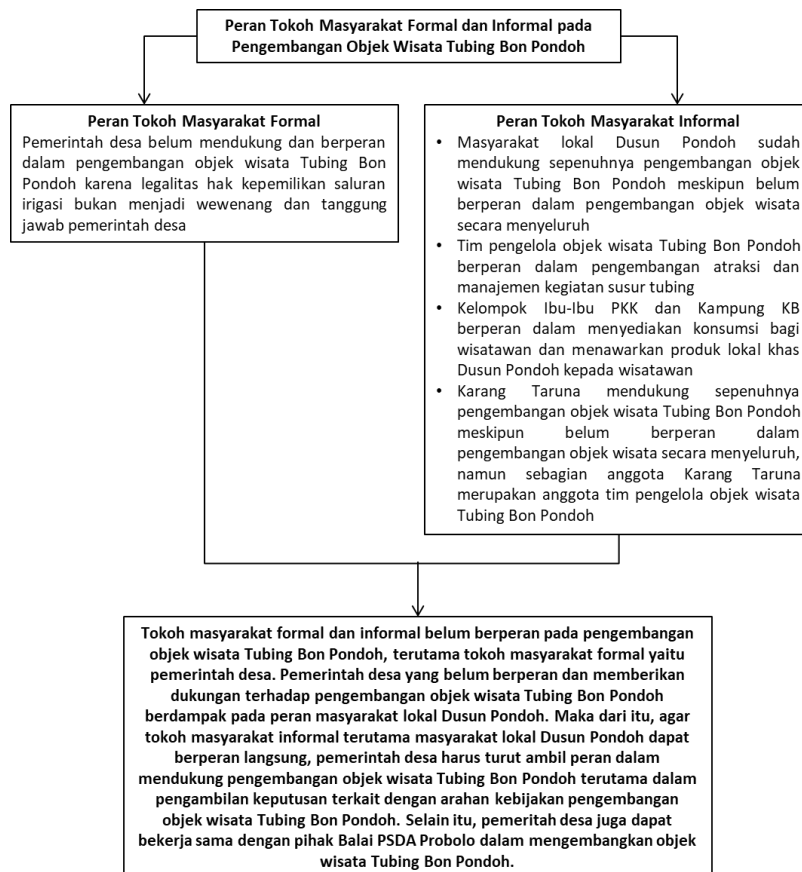
Sedangkan peran tokoh masyarakat informal, yaitu tokoh masyarakat yang memiliki peran dan pengaruh besar dalam mengayomi dan memimpin masyarakat pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh adalah masyarakat lokal Dusun Pondoh, tim pengelola objek wisata Tubing Bon Pondoh, Kelompok Ibu-Ibu PKK sekaligus Kelompok Kampung KB, dan Kelompok Karang Taruna. Masyarakat lokal Dusun Pondoh belum dapat berperan sepenuhnya secara langsung dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh, namun seluruh masyarakat lokal Dusun Pondoh sudah mendukung sepenuhnya kegiatan pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh. Sedangkan seluruh manajemen kegiatan wisata Tubing Bon Pondoh berupa kegiatan susur tubing

dipegang oleh tim pengelola objek wisata Tubing Bon Pondoh. Manajemen kegiatan wisata tersebut seperti mengembangkan atraksi wisata agar dapat menyediakan atraksi wisata selain susur tubing dengan mengembangkan potensi lokal lainnya, serta terkait dengan manajemen sumberdaya manusia dan keuangan. Selain itu, tim pengelola objek wisata Tubing Bon Pondoh juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan susur tubing.

Kelompok Ibu-Ibu PKK sekaligus Kampung KB berperan membantu tim pengelola objek wisata Tubing Bon Pondoh dalam menyediakan Konsumsi untuk wisatawan dan menawarkan produk lokal khas Dusun Pondoh kepada wisatawan sebagai oleh-oleh. Selain itu, kelompok Kampung KB juga berperan dalam *men-support* segala macam kegiatan yang berbasis pada pengembangan potensi lokal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Sehingga secara tidak langsung peran dari Kelompok Kampung KB sangat penting dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh ini. Sedangkan peran Kelompok Karang Taruna masih sama dengan masyarakat lokal Dusun Pondoh, yaitu belum dapat berperan secara langsung dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh akan tetapi mendukung sepenuhnya kegiatan pengembangan objek wisata ini, serta sebagian anggota Kelompok Karang Taruna merupakan anggota tim pengelola objek wisata Tubing Bon Pondoh.

Meskipun pemerintah desa sebagai tokoh masyarakat formal belum meberikan dukungannya dan berperan dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh, namun karena masyarakat lokal Dusun Pondoh dan tokoh masyarakat informal lainnya mendukung sepenuhnya dan memiliki peran penting masing-masing dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh, maka dari itu pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh tetap dilaksanakan. Hal ini karena masyarakat lokal Dusun Pondoh dan tokoh masyarakat lokal lainnya mendapatkan dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung, serta Ketua Pokdarwis Kabupaten Temanggung.

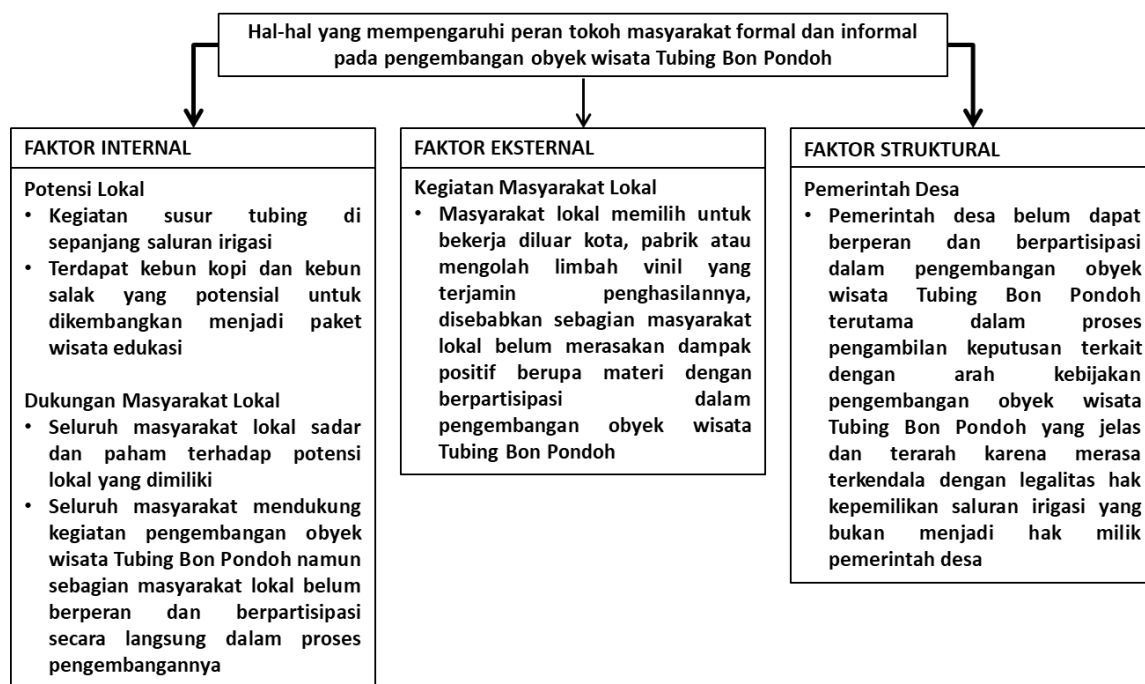
Gambar 4. Bagan Peran Tokoh Masyarakat Formal dan Informal (Analisis, 2022)



Hal-Hal yang Mempengaruhi Peran Tokoh Masyarakat Formal dan Informal pada Pengembangan Objek Wisata Tubing Bon Pondoh

Terdapat tiga hal atau faktor yang mempengaruhi peran tokoh masyarakat baik yang bersifat formal maupun informal pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh. Ketiga faktor tersebut adalah faktor internal, faktor eksternal dan faktor struktural. Faktor internal terdiri dari potensi lokal yang merupakan identifikasi awal potensi lokal yang dapat dikembangkan, serta dukungan dan kesadaran masyarakat lokal yang menentukan apakah potensi lokal tersebut akan dikembangkan atau tidak dan bagaimana pengembangan potensi lokal tersebut dilakukan agar dapat berhasil. Selain itu, terdapat kegiatan masyarakat lokal yang termasuk ke dalam faktor eksternal, karena hal ini yang menentukan bagaimana peran masyarakat lokal terhadap pengembangan objek wisata berbasis potensi lokal, yaitu objek wisata Tubing Bon Pondoh. Faktor terakhir, merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap peran tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat informal, yaitu faktor struktural yang dipengaruhi oleh pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan pendapat Okazaki (2008), baik tokoh masyarakat formal maupun informal dapat bekerja sama dalam mengembangkan wisata berbasis potensi lokal sehingga dapat mengembangkan wisata yang berkelanjutan.

Gambar 5. Bagan Hal yang Mempengaruhi Peran Tokoh Masyarakat Formal dan Informal (Analisis, 2022)



4. KESIMPULAN

Peran tokoh masyarakat formal dan informal pada pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh saling bertolak belakang. Tokoh masyarakat informal mendukung sepenuhnya kegiatan pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh meskipun beberapa tokoh masyarakat informal belum dapat berperan langsung dalam pengembangannya. Sedangkan tokoh masyarakat formal, yaitu pemerintah desa belum dapat memberikannya dan berperan dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh yang disebabkan karena legalitas hak kepemilikan saluran irigasi belum menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa. Jika berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 Tahun 2015 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi, saluran irigasi yang dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan susur tubing merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian berada di bawah kewenangan kantor operasional Balai PSDA

Probolo. Meskipun pemerintah desa sebagai tokoh masyarakat formal belum dapat memberikan dukungan dan perannya dalam pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh, masyarakat lokal Dusun Pondoh bersama dengan tokoh masyarakat informal yang lain tetap melaksanakan pengembangan objek wisata berbasis potensi lokal ini karena mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung, serta Ketua Pokdarwis Kabupaten Temanggung. Agar pengembangan objek wisata Tubing Bon Pondoh ini dapat diupayakan menjadi pengembangan wisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, hendaknya tokoh masyarakat formal dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat informal dengan memberikan dukungan dan berperan dalam pengembangannya. Selain itu, hendaknya pemerintah dapat bekerja sama dengan Balai PSDA Probolo sesuai dengan skema kerja sama dengan sistem sewa yang sudah ditawarkan oleh Balai PSDA Probolo Jawa Tengah.

5. REFERENSI

- Guest, G., MacQueen, K., & Namey, E. (2012). *Applied Thematic Analysis*. Thousand Oaks, California: SAGE Publication.
- Hanajayani, G., & Sariffuddin, S. (2018). Mengatur Desa Wisata: Peran Tokoh Masyarakat Membangun Inisiatif Kolektif Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas. *Tata Loka, Vol. 20, No. 2*, 195-204.
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *ANUVA Volume 2 (3)*, 317-324.
- Jackson, J., & Murphy, P. (2006). Clusters in Regional Tourism: An Australian Case. *Abnnals of Tourism Research, Vol. 33, No. 4*, 1018-1035.
- Kusnadi, E., & Iskandar, D. (2017). Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (hal. 358-363). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Okazaki, E. (2008). A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. *Journal of Sustainable Tourism, Vol. 16, No. 5*, 511-529.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Informasi, Vol. 18, No. 2*, 105-106.
- Suparjan, & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sutarno, N. (2008). *Membina Perpustakaan Desa*. Jakarta: CV Sagung Seto.